

Fenomena KDM: **Dari “Bapak Aing” Hingga** **“Dedi Mercury”,** **Bagaimana Institusi** **Merespon Gaya** **Kepemimpinan Baru?**

2025





KAJIAN CEPAT

Disclaimer: Kajian ini dilaksanakan dalam waktu dan lingkungan terbatas di internal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Wawancara dilaksanakan ke beberapa narasumber untuk mendapatkan sudut pandang, persepsi, atau saran yang dapat menjadi bahan masukan kebijakan. Kajian ini tidak mewakili seluruh suara yang ada di Provinsi Jawa Barat, karena hanya berfokus di beberapa aspek masalah.

Fenomena KDM: Dari “Bapak Aing” Hingga “Dedi Mercury”, Bagaimana Institusi Merespon Gaya Kepemimpinan Baru?

Oleh: Tim Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan BP2D

Disampaikan kepada: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat



ABSTRAK

Fenomena kepemimpinan populis telah menjadi perhatian global, dengan berbagai pemimpin di seluruh dunia menunjukkan karakteristik populis dalam gaya kepemimpinan mereka. Fenomena ini dapat menimbulkan tantangan bagi birokrasi dan institusi pemerintahan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan adaptasi terhadap gaya kepemimpinan yang cenderung mengedepankan pendekatan langsung dan aspek emosional. Oleh karena itu, pegawai dan institusi perlu memahami strategi yang tepat dalam menghadapi kepemimpinan populis agar tetap dapat menjalankan tugas dengan profesional dan efektif. Tulisan ini bertujuan untuk mengenali ciri gaya kepemimpinan populis dan bagaimana institusi perlu merespon gaya tersebut. Kajian ini menggunakan metode wawancara mendalam kepada pegawai yang dianggap informan kunci.

untuk menjelaskan gaya KDM serta mendiskusikan pendekatan teoritis tertentu dalam menjelaskan gaya kepemimpinan tersebut. Rekomendasi dalam kajian mencakup perlunya monitoring konten KDM, respon cepat dengan pendekatan hukum legal (*legality approach*), perlunya unit untuk mengoordinasikan tindak lanjut isu dan janji-janji pimpinan, peningkatan peran perangkat daerah, dan perubahan gaya bekerja yang mengedepankan penyediaan data, pengolahan data, interpretasi data, analisis/pengkajian peraturan, analisis/pengkajian isu teknis, dan tata kelola pelayanan publik langsung ke masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang perangkat daerah.

Keyword: KDM, kepemimpinan, populis.

PENDAHULUAN

Perkembangan sosial media dan tayangan digital telah melampaui fungsi sebagai sarana hiburan dan sarana berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Kini, sosial media dapat berfungsi sebagai alat pendidikan, kampanye politik, hingga jual beli.

Media sosial menjadi jantung aktivitas digital di Indonesia. Dari 285 juta jiwa penduduk Indonesia, 143 juta penduduk Indonesia menjadi pengguna aktif sosial media. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna facebook terbanyak di dunia dengan jumlah akun aktif sebanyak 122 juta pengguna (Hootsuite, 2025). Kemudian disusul oleh Instagram, Tiktok, dan X (Twitter). Namun, jumlah pengguna sosial media tersebut masih kalah dengan jumlah pengguna Youtube di Indonesia. Jumlah pengguna Youtube di Indonesia mencapai 143 juta pengguna dengan jangkauan iklan Youtube setara dengan 50,2% populasi penduduk Indonesia (Hootsuite, 2025). Dengan dominasinya tersebut, tidaklah mengherankan bila konten kreator, pebisnis, hingga para politisi dan pejabat pemerintah berebut pengaruh dan *view* di Youtube.

Akhir-akhir ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau lebih dikenal dengan Kang Dedi Mulyadi (KDM) menarik perhatian publik. KDM berhasil meraih simpati masyarakat berkat konten-konten digitalnya di Youtube, Tiktok, Instagram, dan media sosial lainnya.

KDM kerap membagikan kegiatannya di media sosial yang kerap menyelesaikan masalah langsung di tempat. Rata-rata jumlah tinjauan atau *view* di akun Kang Dedi Mulyadi Channel dan Lembur Pakuan Channel dapat melebihi 500 ribu *views* dalam setiap kontennya. Beberapa diantaranya ada yang melebihi 1 juta *views* Sebagai catatan, KDM bisa mengunggah 3 konten Youtube dalam sehari. KDM juga mengunggah kegiatannya melalui Tiktok, Instagram, hingga X (Twitter). Sehingga penetrasi konten KDM tidak hanya riuh di platform Youtube saja, namun juga menjadi perhatian netizen di media sosial lainnya.

Fenomena gaya kepemimpinan KDM di media sosial menjadi menarik untuk ditelusuri. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena gaya komunikasi dan kepemimpinan KDM dan bagaimana institusi Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon fenomena ini.



METODE KAJIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, tim akan melakukan wawancara mendalam atau *in depth interview* kepada pegawai yang dianggap informan kunci untuk menjelaskan gaya KDM. Pemilihan informan didasarkan pada pengalaman informan dalam berinteraksi dengan gubernur terpilih dan pengalaman informan sebagai birokrat.

In depth interview adalah metode pengambilan data kualitatif untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan motivasi secara lebih mendetail. *In depth interview* biasanya mengakomodir fleksibilitas yang berfungsi menggali lebih dalam area-area yang menjadi fokus penelitian. Itu sebabnya *in depth interview* lebih banyak bersifat tidak berstruktur atau semi-berstruktur. Namun, maksud tidak berstruktur bukan berarti tidak menyiapkan “struktur” untuk wawancara. Tugas utama pewawancara ialah membangun dan mengeksplor respon partisipan terhadap pertanyaan yang diajukan. maka akan sangat penting bila pewawancara memiliki bingkai pertanyaan yang sesuai dengan studi yang akan dieksplor.

Tujuan *in depth interview* bukanlah untuk keperluan tes hipotesis dan tidak juga untuk mengevaluasi (Seidman, 2019). *In depth interview* sangat berguna untuk memahami perilaku kompleks, proses-proses sosial, dan pengalaman individu. *In depth interview* lebih berfokus kepada pengumpulan data deskriptif yang kaya alih-alih data numerik.

TEMUAN LAPANGAN

Bab ini menggambarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan. Tujuannya ialah berusaha memahami dan bagaimana respon yang seharusnya dilakukan oleh institusi dan individu di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Karakteristik KDM di Lapangan

KDM selalu berkomunikasi secara *direct* (langsung), tidak suka berbasa-basi ketika membicarakan isu, dan ingin jawaban *direct* (langsung) pula. KDM sering bertanya mengenai data spesifik yang perlu dijawab oleh perangkat daerah misalnya suatu ketika beliau bertanya mengenai data desa yang jumlah masyarakat miskin terbanyak. Dalam menjawab pertanyaan KDM, institusi atau individu tidak usah menjelaskan bertele-tele, cukup menjawab apa yang ditanyakan.

KDM tidak mau terikat oleh kegiatan formal. Dalam mengutarakan gagasan, KDM jarang sekali menggunakan bahan paparan ataupun teks yang telah disiapkan oleh institusi. Begitu juga ketika institusi ingin menjelaskan sesuatu, sangat tidak direkomendasikan menjelaskan dengan bahan paparan yang formal. KDM kerap kali berbicara langsung *face to face* di suasana yang lebih informal.

Hampir seluruh instruksi langsung terhadap perangkat daerah diselenggarakan dalam suasana informal yang tidak ada petunjuk dari beliau akan membicarakan apa sebelumnya. Namun, perangkat daerah tetap harus menyiapkan paparan atau teks untuk KDM sebagai persiapan karena kadang-kadang KDM sering bertanya mengenai bahan bahasan.

KDM sering bertindak spontan, terutama pada pagi hari. Beliau sering langsung menghubungi pimpinan perangkat daerah ketika di kepalanya ada ide atau inspirasi tertentu yang langsung menginstruksikan pimpinan tersebut untuk bertindak. Namun, tantangannya KDM kadang-kadang tidak menjelaskan secara detail terkait gagasan beliau sehingga dibutuhkan inisiatif lembaga untuk menerjemahkan instruksi tersebut.

Namun bila melihat spontanitas KDM, tindakan spontan tersebut sebenarnya berpola. Pola yang dimaksud ialah *9 Langkah Ngawujudkeun Jabar Istimewa*. Oleh karena itu perangkat daerah perlu benar-benar memahami dan berpegang teguh terhadap visi-misi Dedi-Erwan tersebut. Seperti yang dijelaskan salah satu informan bahwa apabila KDM berinisiatif terhadap sesuatu, namun ternyata bertentangan dengan *9 Langkah Ngawujudkeun Jabar Istimewa* tersebut KDM dapat menerima dengan baik koreksi tersebut. Namun, perlu disampaikan alternatif pengganti atau perbaikan dari inisiatif tersebut.

KDM sering memiliki insting yang bisa muncul kapan saja. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu sekali cair dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat KDM didalamnya. Perubahan di detik terakhir bisa saja terjadi sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh KDM

KDM sangat memerhatikan simbolisme dan makna dari sebuah kesenian atau pertunjukan. Sering sekali KDM menginstruksikan secara langsung kegiatan-kegiatan di lapangan seperti misalnya Musrenbang, Nganjang ka Warga, dll. Beliau memiliki visi dan keinginan tertentu yang perlu diwujudkan oleh perangkat daerah. Selama ini bagian pertunjukan kesenian ditentukan sendiri dan tim kreatif dan kesenian beliau. KDM senang dengan pertunjukan yang memiliki bobot “makna” tinggi dibandingkan hanya sekedar pertunjukan kesenian biasanya. KDM sering menggunakan tim kesenian beliau sehingga terlihat jelas perbedaan bobot “makna”-nya. Oleh karena itu perangkat daerah perlu memiliki ketajaman seni ketika membuat kegiatan yang melibatkan KDM. Selain itu, KDM juga sangat mengedepankan etika dan budaya sopan santun budaya sunda. Mulai dari cara duduk, hingga kebiasaan beliau yang sering mengantar tamu hingga ke kendaraan perlu diperhatikan dengan saksama.

Dalam hal politik, KDM langsung berhubungan dengan pihak misalnya DPRD. Seluruh pejabat di Pemprov Jawa Barat harus meminta ijin dan menunggu instruksi KDM bila ingin berkomunikasi dengan DPRD. Hal ini dilakukan karena selama ini KDM langsung yang berkomunikasi dengan DPRD. Selain itu, KDM memiliki tim hukum yang khusus untuk mengadvokasi masyarakat langsung. Hal tersebut beliau lakukan karena ada keterbatasan Biro Hukum terkait peraturan dan kewenangan. Namun perlu diperhatikan model-model advokasi langsung terhadap masyarakat ke depan yang bisa dilakukan oleh perangkat daerah.

Pemantauan Konten KDM

Pemantauan konten KDM baik itu yang diunggah di Youtube maupun media sosial lainnya perlu dipantau oleh seluruh institusi dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seluruh informan yang diwawancarai menyatakan bahwa memantau konten KDM menjadi sebuah keharusan. Para informan yang diwawancarai memantau konten KDM secara mandiri atau inisiatif sendiri. Lebih jauh, para informan juga menjelaskan bahwa mereka menginstruksikan ke petugas hubungan masyarakat (humas) di perangkat daerah masing-masing untuk memantau konten KDM, terutama untuk segera mencatat dan melaporkan apabila terdapat irisan tugas dan wewenang perangkat daerahnya yang terkait isu yang dibicarakan oleh KDM.

Tim KDM menggunakan tim humas dan kreatif sendiri dalam meliput kegiatan KDM sehari-hari. Namun, kini telah ditugaskan staf dari Bappeda, Diskominfo, dan Sekretariat Daerah untuk mencatat isu atau janji yang diucapkan KDM di berbagai kesempatan untuk dijadikan bahan tindak lanjut bagi Pemprov Jawa Barat. Hasil dari catatan ini akan dituangkan ke *dashboard* pimpinan untuk menjadi bahan evaluasi. Namun, beberapa informan menyatakan perlu ada semacam matriks isu dan permasalahan hasil pemantauan yang isinya telah diolah untuk didistribusikan secara regular dan menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Dalam hal ini beberapa informan sepakat agar Diskominfo melalui bagian pemantauan untuk menyusun matriks dimaksud beserta perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam isu yang disebut.

Budaya Kerja

Terkait budaya kerja, KDM tidak terlalu suka dengan acara-acara formal seperti rapat pimpinan. Banyak dari konten KDM yang membahas isu tertentu tanpa menanyakan dulu ke institusi terkait. Oleh karena itu, salah seorang informan menyatakan bahwa dalam konten KDM berisi perintah secara tidak langsung untuk perangkat daerah. Oleh karena itu pemantauan isu di konten maupun diluar konten KDM perlu dilakukan karena penugasan kerap muncul dari konten. Jadi polanya kadang dibalik, isu dulu berkembang kemudian membuat telaahan atau kajian hukumnya.

Seluruh informan yang diwawancarai sepakat bahwa diperlukan kecepatan dalam merespon apa yang ditanyakan atau diinginkan KDM baik secara langsung ataupun melalui Sekretaris Daerah. KDM sering bertanya dan memerlukan jawaban pada saat itu juga. Oleh karena itu diperlukan basis data yang akurat dan lengkap untuk menjawab isu. Untuk mengatasi kecepatan KDM, seluruh informan sepakat bahwa pimpinan dan pegawai daerah wajib mengerti dan paham regulasi yang berhubungan dengan kewenangannya. Hal ini dilakukan selain untuk mengamankan kebijakan yang diambil juga dapat digunakan untuk mencari alternatif kebijakan yang sesuai regulasi. Oleh sebab itu, institusi perlu memberikan alternatif-alternatif kebijakan dengan gambaran risiko masing-masing untuk mendukung kebijakan yang diambil. Setiap perangkat daerah harus mampu menyusun atau *mapping* aturan yang berlaku, proses atau prosedur suatu kegiatan, dan program kegiatan beserta alternatif-alternatifnya.

Salah seorang informan menekankan perlunya pendekatan legalitas (*legality approach*) untuk menyelesaikan masalah. Suatu isu yang dibicarakan KDM harus ditangkap oleh institusi dan diterjemahkan ke bahasa perencanaan dan program kegiatan dengan beberapa alternatif kebijakan. Dalam pembahasan atau rapat internal perangkat daerah wajib menyertakan notulensi yang berfungsi untuk evaluasi penanganan isu dan bukti telah dilakukan respon terhadap isu yang berkembang.

Masing-masing perangkat daerah harus aktif tanpa menunggu instruksi baik itu dari KDM langsung atau Sekretaris Daerah untuk merespon dan mitigasi risiko. Salah seorang informan mengungkapkan bahwa karakter perangkat daerah yang harus dimiliki di zaman KDM ialah inisiatif dalam memecahkan isu, kolaboratif dengan sesama perangkat daerah lainnya, aktif koordinasi ke pemerintah pusat maupun penegak hukum, dan aktif berdialog pada ahli atau akademisi.

Beberapa informan juga menekankan penguatan institusi-institusi tertentu untuk menyelaraskan janji-janji KDM dengan program kegiatan yang ada seperti:

- a. Penguatan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Memastikan instruksi KDM dapat diakomodir oleh program-program yang direncanakan dalam dokumen perencanaan provinsi Jawa Barat
 - 2) Memastikan instruksi KDM dapat direalisasikan dari segi anggaran
- b. Penguatan Peran Asisten Daerah
 - 1) Mengoordinir dan memastikan setiap biro dan perangkat daerah melakukan monitoring isu dan kebijakan KDM melalui kanal digital maupun non digital

- 2) Monitoring implementasi tindak lanjut atas instruksi KDM yang dilakukan oleh perangkat daerah
 - 3) Melaksanakan rapat koordinasi rutin dengan biro dan perangkat daerah yang dibawah untuk memantau progress tindak lanjut instruksi KDM
 - 4) Mengoptimalkan Tim Kaji Cepat untuk memberikan hasil analisis dan saran kepada Sekda terkait isu dan kebijakan tertentu
- c. Penguatan Peran Inspektorat Daerah
- 1) Memberikan layanan konsultasi kepada perangkat daerah untuk mitigasi risiko dalam implementasi tindak lanjut atas instruksi KDM
 - 2) Memberikan pendampingan kepada perangkat daerah untuk menjaga implementasi kebijakan patuh pada regulasi.
- d. Dinas Komunikasi dan Informasi harus memantau terus instruksi KDM untuk kemudian memetakan isu dan topik sesuai dengan kewenangan perangkat daerah dan segera mendistribusikan hal tersebut ke perangkat daerah terkait dan perangkat daerah lainnya. Pendistribusian matriks isu dan topik harus dilakukan setiap hari agar perangkat daerah selalu menyiapkan diri untuk menjawab isu permasalahan yang ada.

Dalam wawancara terungkap perlu ada pihak yang dapat *follow-up* sudah sejauh mana sebuah isu terselesaikan atau sudah sejauh mana sebuah isu telah dikerjakan yang bekerja mengkoordinasi beberapa perangkat daerah dalam tiap isu. Beberapa informan mengusulkan tim *Ad Hoc* yang pembagiannya berdasarkan isu strategis. Misalnya, tim *Ad Hoc* pengentasan kemiskinan, tim *Ad Hoc* penurunan pengangguran, dsb. Tim *Ad Hoc* ini berfungsi mengkoordinasi dan monitoring penyelesaian isu. Ada pula yang berpendapat bahwa fungsi Asisten Daerah dapat difungsikan untuk tugas seperti ini. Sebenarnya Sekretaris Daerah telah menyusun tim kaji cepat dalam usaha untuk melaksanakan instruksi KDM. Tim kaji cepat ini perlu diketahui oleh seluruh perangkat daerah. Meskipun begitu perlu diperjelas apakah tim kaji cepat ini hanya bertugas atau merespon suatu isu atau juga terus mem-*follow up* isu tersebut.

DISKUSI

Pemerintah yang aktif menggunakan media sosial lebih disukai di mata publik.

Dalam perspektif teori kebijakan publik, The New Public Service (NPS) telah mengakui bahwa masyarakat diperlakukan sebagai *co-creator* atau mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan publik. NPS lahir sebagai kritik terhadap New Public Management (NPM). NPM dikritik karena terlalu menyerahkan kebijakan ke pasar yang terdapat pihak swasta dan pemerintah didalamnya. Kritik ini muncul karena kebijakan dengan perspektif NPM gagal dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan sehingga kesenjangan antara rakyat miskin dan kaya semakin lebar. Selain itu, NPM gagal dalam menciptakan produk dan kebijakan yang mengikuti keinginan penduduk. Secara singkat NPM gagal dalam memenuhi ekspektasi, kepuasan, kepercayaan, maupun partisipasi masyarakat (OECD, 2011).

Dalam perspektif NPS, ekspektasi, kepuasan, kepercayaan, maupun partisipasi masyarakat merupakan syarat kunci proses Pembangunan yang berhasil. Dalam perspektif baru ini, menempatkan kebutuhan publik tidak ditentukan oleh tujuan politik seseorang, melainkan dengan dialog dengan masyarakat dalam melahirkan produk kebijakan.

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam layanan publik (Bertot et al. 2010; Chen & Zhang 2012; Chun et al. 2010). Saluran-saluran komunikasi baik itu sosial media, video daring, atau website resmi pemerintah dapat dimanfaatkan menjadi saluran masyarakat untuk bersama-sama menyusun prioritas kebutuhan pembangunan yang bersifat *people oriented*. Masyarakat sangat menginginkan dialog dengan pemerintah melalui komunikasi dua arah dalam menyampaikan kritik, informasi, atau saran dalam meningkatkan kualitas layanan publik (Gunawan, 2019). Jika pemerintah merespon secara aktif masukan masyarakat, hal tersebut akan menguatkan hubungan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa didengar dan ditanggapi (Kolsaker & Lee-kelley 2008).

Banyak contoh studi yang meneliti mengenai hubungan kepercayaan dan kepuasan Masyarakat dengan layanan pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terutama media sosial. Misalnya, Grimmeliikhuijsen & Meijer (2015) mengungkapkan bahwa kepolisian Belanda lebih dipandang positif oleh warga setelah polisi menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Di Jepang, Seki (2016) membandingkan sentimen warga di media sosial ketika pelaksanaan festival kota. Sentimen negatif warga berkurang drastis setelah pemerintah daerah menggunakan

media sosial untuk menginformasikan dan berkomunikasi dengan warga mengenai tempat parkir kosong dan jalur jalan yang ditutup. Di Korea, Kim et al. (2013) menyatakan bahwa semakin puas warga terhadap pelayanan suatu instansi pemerintah di media sosial, maka semakin puas juga kepuasan warga terhadap pemerintah secara umum.

Guillamón et al. (2016) mempelajari 217 pemerintah daerah di Italia dan Spanyol yang menggunakan media sosial. Mereka menemukan temuan bahwa pemerintah daerah yang memiliki banyak utang cenderung pasif dalam media sosialnya, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki keuangan sangat baik cenderung terbuka dan aktif bermedia sosial dengan warganya. Hal ini disebabkan keengganan pemerintah daerah yang memiliki utang besar untuk terbuka atas kondisinya. Temuan ini mengklaim bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah dapat menjadi tolok ukur apakah di suatu daerah pemerintahnya transparan atau tidak.

Sobaci & Karkin (2013) meneliti konten Twitter seluruh gubernur, walikota, dan bupati di Turki. Mereka menyimpulkan mayoritas pejabat ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan melaporkan kegiatan dan lokasi mereka. Penggunaan media sosial oleh para pemimpin daerah ini masih bersifat searah dan tidak bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan media sosial di kalangan pejabat di Turki masih belum dikatakan dapat meningkatkan pelayanan publik. Namun, terdapat satu pemimpin di Turki yaitu walikota Antalya yang kontennya meningkatkan pelayanan publik. Ia menggunakan sosial medianya untuk berkomunikasi dengan warganya terkait pelayanan publik. Interaksi warga dengan walikota sangat sering sehingga Walikota Antalya mendapat respon positif dari masyarakat Antalya ataupun Turki. Walikota Antalya memiliki follower Twitter (X) dan unggahan tertinggi diantara para kepala daerah di Turki.

Konten-konten KDM banyak berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Selain itu, KDM banyak menggarap konten-konten yang menjadi permasalahan publik dan permasalahan terkini. Misalnya saja masalah *study tour* yang banyak dikeluhkan oleh sebagian warga, penanganan anak bermasalah, dan penertiban tempat-tempat yang tidak memiliki ijin legal memberikan persepsi tersendiri bagi masyarakat. KDM mampu memberikan solusi dan kebijakan terhadap masalah-masalah yang telah lama muncul dan menjadi bahan keluhan masyarakat yang selama ini tidak jelas penyelesaiannya. Fenomena ini dijelaskan oleh Kolsaker & Lee-kelley (2008) ketika masyarakat merasa didengar dan dilihat dan merasa dilibatkan dalam penyelesaian masalah, maka kepercayaan terhadap KDM pun akan meningkat.

Fenomena Gaya Kepemimpinan Populis: Perspektif Teoritis

Fenomena gaya kepemimpinan KDM mulai menarik perhatian baik masyarakat awam ataupun akademisi. Dari beberapa gaya pemimpin, seseorang tidak serta merta dapat dikategorikan dalam gaya tertentu. Namun, untuk memahami gaya tertentu para peneliti terutama peneliti politik memetakan dan memberi gambaran mengenai gaya para pemimpin.

Dalam beberapa dekade terakhir fenomena pemimpin populis (populist leader/populism) muncul di berbagai negara. Mulai dari kawasan Amerika Selatan, Amerika Serikat, Eropa, Asia, hingga Afrika memunculkan banyak contoh pemimpin populis. Dari beberapa pemimpin negara yang dianggap sebagai pemimpin populis seperti Donal Trump di AS, Nigel Farage di Inggris, Giorgia Meloni di Italia, Viktor Orban di Hungaria, Rodrigo Duterte di Filipina, Javier Milei di Argentina, dan Jair Bolsonaro di Brazil.

Gaya dari masing-masing pemimpin populis bisa berbeda-beda. Baik pemimpin yang bermazhab “kanan” atau “kiri” dapat menjadi pemimpin populis. Begitu pula dengan sistem pemerintahan. Pemimpin populis dapat lahir dari negara yang menganut sistem otoritarian maupun demokrasi. Profesor politik dari Columbia University, Nadia Urbinati mengatakan kekuatan utama dari populisme ialah kemampuan untuk beradaptasi atau berubah dengan sangat cepat dalam berbagai fungsi maupun aktivitas (Urbinati, 2019).

Meskipun performa politik maupun pembawaan karakter tiap individu dari tokoh politik populis dapat berbeda-beda, namun beberapa karakteristik dari tokoh populis memiliki beberapa kemiripan. Moffitt (2016) menjelaskan bahwa, meskipun tidak selalu melekat secara keseluruhan, karakteristik para tokoh populis dapat muncul dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Tokoh populis memosisikan diri mereka sebagai perwakilan dari rakyat biasa dan memosisikan diri sebagai lawan dari para kaum elitis. Mereka menampilkan diri mereka sebagai suara dari rakyat jelata dan mereka adalah manifestasi dari rakyat itu sendiri. Dalam populisme, tokoh populis cenderung melihat diri mereka sebagai “pemimpin yang luarbiasa” yang mampu menyambungkan keinginan rakyat.
2. Tokoh populis menempatkan diri sebagai anti-retorik yang cenderung mengkritik “para elit” yang selama ini berkuasa. Mereka cenderung kurang menyukai sistem demokrasi atau pengambilan kebijakan yang sesuai sistem yang mengedepankan proses demokrasi berjenjang. Sistem dan institusi dianggap lambat sehingga menimbulkan kesan sangat diperlukan “*strongman leader*”. Akibatnya tokoh populis yang terpilih menjadi pejabat publik seperti “terpaksa” terus

berkampanye seperti sebelum terpilih dan menjaga jarak dengan institusi untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia bukanlah bagian dari “para elit” yang berkuasa (Urbinati, 2019).

3. Tokoh populis memosisikan dan mengklaim dirinya sebagai warga biasa dengan menekankan pada hubungan sehari-hari dengan rakyat menggunakan bahasa informal, bahasa lokal, bahasa *slang* yang terkadang kasar bagi sebagian orang. Hal ini ditambah dengan perilaku yang terlihat *down-to-earth* seperti makan bersama warga, panen bersama warga, ikut bekerja atau memperbaiki fasilitas umum dengan warga, dan sebagainya.
4. Dalam populisme, sebuah masalah atau krisis bukanlah fenomena yang netral. Hal tertentu dapat diangkat menjadi sebuah “krisis”. Tokoh populis cenderung “mempertunjukkan” sebuah “krisis” dengan menempatkan dirinya sebagai solusi terhadap “krisis” mendesak tersebut.
5. Tokoh populis cenderung mempertunjukkan pengambilan keputusan di tempat dan menawarkan solusi yang sederhana terhadap masalah yang sebenarnya multidimensi. Hal ini ditambah dengan kecenderungan terlalu banyak berjanji tanpa menjelaskan cara yang tepat untuk mengeksekusi janji tersebut. Solusi yang ditawarkan lebih mengedepankan aspek emosi ketimbang kebijakan yang dijabarkan secara runut dan detail. Itu sebabnya, tokoh populis cenderung sulit menjabarkan rencana kebijakan dan perencanaan yang terstruktur.
6. Kepribadian dan citra tokoh populis mendominasi bagaimana mereka bergerak dan mengambil keputusan. Mereka akan meningkatkan karisma mereka mulai dari gaya komunikasi hingga gaya berpakaian untuk meningkatkan loyalitas warga dan memobilisasi pendukung. Itu sebabnya tokoh populis senang dan mahir dalam mengoptimalkan media massa tradisional dan media baru seperti media sosial untuk menyebarkan pesan mereka dan tetap terhubung dengan audiens mereka.

REKOMENDASI

1. Monitoring konten. Setiap perangkat daerah dan pegawai perlu aktif memerhatikan konten, sikap, maupun janji yang disampaikan oleh pimpinan baik itu di media massa maupun di media sosial dan tayangan video digital. Monitoring ini bukan hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh pimpinan, namun juga perlu dilihat pula bagaimana masyarakat merespon hal tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memonitor komentar netizen dalam saluran-saluran media sosial maupun platform video digital (Youtube). Salah satu Langkah nyata ialah dengan memperkuat Diskominfo yang dapat memantau terus instruksi KDM untuk kemudian memetakan isu dan topik sesuai dengan kewenangan perangkat daerah dan segera mendistribusikan hal tersebut ke perangkat daerah terkait dan perangkat daerah lainnya.
2. Setiap perangkat daerah harus siap dalam merespon isu-isu yang muncul dengan cepat. Pendekatan yang harus dilakukan perangkat daerah ialah pendekatan aturan atau *legality approach*. Setiap perangkat daerah harus mampu menyusun atau *mapping* aturan yang berlaku, proses atau prosedur suatu kegiatan, dan program kegiatan beserta alternatif-alternatifnya yang berhubungan dengan tugas, kewenangan dan proses bisnis perangkat daerahnya. *Legality approach* justru bukan menjadikan perangkat daerah menjadi kaku, namun perangkat daerah mampu memberikan alternatif-alternatif kebijakan dengan risiko masing-masing yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.
3. Perlu menyiapkan unit kerja yang mampu mengkaji dan *follow-up* janji-janji atau instruksi KDM. Unit ini perlu mengoordinasikan dan merespon instruksi yang perlu didukung data, fakta, dan empati agar tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Dalam hal ini Tim Kaji Cepat dapat memosisikan diri sebagai unit tersebut. Alternatif lainnya ialah dengan membentuk tim Ad-Hoc yang dibentuk berdasarkan isu untuk fokus dalam mengawal isu tersebut.
4. Seluruh perangkat daerah terutama Bappeda, Asisten Daerah, dan Inspektorat merupakan perangkat daerah strategis yang berperan dalam memastikan instruksi KDM dapat diimplementasikan dengan cepat dan tepat dari sisi sasaran, anggaran, dan peraturan. Untuk mengimbangi kecepatan kerja KDM, perlu ada penguatan peran pada ketiga perangkat daerah tersebut.

- a. Penguatan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Memastikan instruksi KDM diakomodir oleh program-program yang direncanakan dalam dokumen perencanaan provinsi Jawa Barat
 - 2) Memastikan instruksi KDM dapat direalisasikan dari segi anggaran
 - 3) Menjadi atau menentukan PIC dari perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti instruksi KDM
 - b. Penguatan Peran Asisten Daerah
 - 1) Mengoordinir dan memastikan setiap biro dan perangkat daerah melakukan monitoring isu dan kebijakan KDM melalui kanal digital maupun non digital
 - 2) Monitoring implementasi tindak lanjut atas instruksi KDM yang dilakukan oleh perangkat daerah
 - 3) Melaksanakan rapat koordinasi rutin dengan biro dan perangkat daerah yang dibawahhi untuk memantau progres tindak lanjut instruksi KDM
 - 4) Mengoptimalkan tim Kaji Cepat untuk memberikan hasil analisis dan saran kepada Sekda terkait isu dan kebijakan tertentu.
 - c. Penguatan Peran Inspektorat Daerah
 - 1) Memberikan layanan konsultasi kepada perangkat daerah untuk mitigasi risiko dalam implementasi tindak lanjut atas instruksi KDM
 - 2) Memberikan pendampingan kepada perangkat daerah untuk menjaga implementasi kebijakan patuh pada regulasi.
 - d. Dinas Komunikasi dan Informasi harus memantau terus instruksi KDM untuk kemudian memetakan isu dan topik sesuai dengan kewenangan perangkat daerah dan segera mendistribusikan hal tersebut ke perangkat daerah terkait dan perangkat daerah lainnya. Pendistribusian matriks isu dan topik harus dilakukan setiap hari agar perangkat daerah selalu menyiapkan diri untuk menjawab isu permasalahan yang ada
5. Perangkat daerah dan pegawai harus menyadari perubahan gaya kerja dan budaya kerja yang lebih dinamis dan cepat dengan meningkatkan inisiatif dan responsivitas terhadap isu yang muncul. Budaya dan kebiasaan bekerja sudah harus mengarah ke penyediaan data, pengolahan data, dan interpretasi data. Selain itu pekerjaan sehari-hari harus mengarah ke analisis/pengkajian peraturan, analisis/pengkajian isu teknis, dan tata kelola pelayanan publik langsung ke masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang perangkat daerah.

Matriks Rekomendasi

No	Topik Utama	Isi Rekomendasi	Pelaksana/Pihak Terkait	Tujuan
1	Monitoring Konten dan Respons Publik	Memonitor konten KDM di medsos, serta respons masyarakat/netizen melalui komentar.	1. Diskominfo 2. Seluruh perangkat daerah	Pemetaan isu dan distribusikan ke perangkat daerah terkait, supaya dilakukan langkah strategis dalam menyelesaikan isu tersebut
2	Respons Cepat dan Legalitas Kebijakan	Gunakan pendekatan legalitas (<i>legality approach</i>); <i>mapping aturan</i> , proses, program dan alternatif kebijakan yang sesuai regulasi.	Semua perangkat daerah	Respon cepat terhadap isu sesuai aturan dan wewenang
3	Tindak isu dan <i>follow-up</i> janji dan program KDM di konten dan non-konten	Bentuk unit kerja untuk mengkaji dan menindaklanjuti janji/instruksi KDM berbasis data dan empati.	Alternatif 1: Tim Kaji Cepat Alternatif 2: Tim ad hoc berdasarkan urusan: Ad hoc pengentasan kemiskinan, ad hoc penurunan stunting, ad hoc penurunan pengangguran, dll. Alternatif 3: Follow-up isu dan progress penyelesaian dikoordinasikan Asisten Daerah berdasarkan bidang kerjanya	Menindaklanjuti instruksi berbasis aturan (<i>legality approach</i>), kajian dan alternatif kebijakan.
4	Peran Strategis Bappeda	Memastikan instruksi masuk ke dokumen perencanaan, terakomodasinya anggaran dengan bijak, dan menentukan PIC tindak lanjut per OPD-nya.	Bappeda	Integrasi instruksi dalam perencanaan dan pembangunan
5	Peran Strategis Asisten Daerah	Koordinasi monitoring kebijakan, rapat rutin, pantau progres implementasi, optimalkan Tim Kaji Cepat.	Asisten Daerah	Menjamin kelancaran koordinasi dan implementasi kebijakan
6	Peran Strategis Inspektorat	Konsultasi dan pendampingan perangkat daerah agar implementasi kebijakan sesuai regulasi.	Inspektorat Daerah	Mitigasi risiko dan kepatuhan regulasi

7	Peran Strategis Diskominfo	Pantau instruksi KDM, petakan isu-topik sesuai kewenangan per OPD, distribusi rutin matriks isu ke seluruh perangkat daerah.	Diskominfo	Distribusi isu-topik harian, supaya terjadi respons cepat dari perangkat daerah
8	Perubahan Budaya Kerja	Gaya kerja baru pegawai: 1. Inisiatif 2. Responsivitas 3. Penyediaan data 4. Pengolahan data 5. Interpretasi data 6. Analisis/pengkajian peraturan 7. Analisis/pengkajian isu teknis 8. Tata kelola pelayanan publik langsung ke masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang perangkat daerah.	1. Seluruh perangkat daerah 2. Biro Organisasi 3. BKD 4. BPSDM	Adaptasi budaya kerja dinamis dan responsif terhadap isu.

Daftar Pustaka

- Bertot, J.C., Jaeger, P.T. & Grimes, J.M., 2010. Using ICTs to create a culture of transparency : E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), pp.264–271. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>.
- Chen, Y. & Zhang, J.-C., 2012. Citizen-centric e-government performance: satisfaction with e-information. *Electronic Government, An International Journal*, 9(4), pp.388–402.
- Chun, S. et al., 2010. Government 2.0 : Making connections between citizens, data and government. *Information Polity*, 15(1–2), pp.1–9.
- Grimmelikhuijsen, S.G. & Meijer, A.J., 2015. Does Twitter Increase Perceived Police Legitimacy? *Public Administration Review*, 75(4), pp.598–607.
- Guillamón, M. et al., 2016. Factors influencing social media use in local governments: The case of Italy and Spain. *Government Information Quarterly*, 33(3), pp.460–471. Available at:
- Kolsaker, A. & Lee-kelley, L., 2008. Citizens ' attitudes towards e-government and e-governance : a UK study. *Int. J. Public Sector Manag.*, 21(7), pp.723–738.
- Kim, S.K., Park, M.J. & Rho, J.J., 2013. Effect of the Government's Use of Social Media on the Reliability of the Government: Focus on Twitter. *Public Management Review*, 17(March 2015), pp.1–28. Available at: <http://dx.doi.org/10.1080/14719037.2013.822530>.
- Moffitt, Benjamin., 2016. *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*. Stanford University Press.
- OECD, 2011. Together for better public services: Partnering with citizens and civil society. *OECD Public Governance Reviews: OECD Publishing*.
- Seidman, I. (2019). *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences*. Teachers College Press
- Seki, Y., 2016. Use of Twitter for Analysis of Public Sentiment for Improvement of Local Government Service. *2016 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP)*, pp.1–3.
- Sobaci, M.Z. & Karkin, N., 2013. The use of twitter by mayors in Turkey: Tweets for better public services? *Government Information Quarterly*, 30(4), pp.417–425.
- Urbinati, Nadia., 2019. *Political Theory of Populism*. Annual Review of Political Science, Vol 22

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

(022) 87328066 

bp2d@jabarprov.go.id 

Jl. Kawalayaan Indah Raya No.6 Kelurahan Jatisari 
Kecamatan Buah batu Kota Bandung 40286